

Kegunaan Kartu Kendali dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Jawik

Ajeng Trismay Pangesti¹, Sri Marwanti², Joko sutrisno³

^{1,3} Program Studi S2 Agribisnis, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutami no 36 Ketingan Surakarta

Email : ajengpangestiku@gmail.com

Abstract: In Jawik Village, Tambakrejo District, Bojonegoro Regency, control cards are used to distribute subsidized fertilizers. The study looked at this practice. The purpose of this study is to determine and assess the usefulness of this control card in distributing fertilizers at a lower cost in Jawik Village, Tambakrejo District, Bojonegoro Regency. Descriptive analysis and discussion of farmers' views on control cards were included in this study. Data collection was carried out through observation, interviews, and analysis of farmers' views on the use of control cards in the distribution of subsidized fertilizers in quantity, type, price, quality, and on time. Farmers who have a control card and membership in a farmer's association are automatically eligible to participate in research. The results showed that the distribution of subsidized fertilizers through control cards was in accordance with existing regulations and followed the guidelines on time, right amount, right type, right quality, and right price. However, there are several challenges such as inappropriate timing and the absence of subsidized fertilizer distribution in Jawik Village.

Keywords : Control Card, Fertilizer distribution, subsidized fertilizer

Abstrak: Pada Desa Jawik, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, kartu kendali digunakan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Studi ini melihat praktik ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai kegunaan kartu kendali ini dalam pendistribusian pupuk dengan biaya lebih murah di Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Analisis deskriptif dan pembahasan pandangan petani terhadap kartu kendali dimasukkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis pandangan petani mengenai penggunaan kartu kendali dalam penyaluran pupuk bersubsidi dalam jumlah, jenis, harga, kualitas, dan tepat waktu. Petani yang memiliki kartu kendali dan keanggotaan dalam asosiasi petani secara otomatis berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu kendali telah sesuai dengan peraturan yang ada dan mengikuti pedoman tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat harga. Namun terdapat beberapa tantangan seperti waktu yang tidak tepat dan tidak adanya distribusi pupuk bersubsidi di Desa Jawik.

Kata kunci: Kartu Kendali, Penyaluran pupuk, pupuk bersubsidi

1. PENDAHULUAN

Salah satu sektor pembangunan yang mempunyai fungsi krusial adalah pertanian. Agar individu dapat mempunyai akses terhadap pangan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka sektor pertanian harus ada (kelompok dasar). Karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, maka menyediakan pangan yang cukup bagi semua orang setiap saat merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan. Perhatian utama pemerintah adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan setiap orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia banyak menghadapi kendala yang sulit dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Akibatnya, isu ketahanan pangan menjadi pusat perhatian dalam pertumbuhan, khususnya di bidang pertanian (Apriyana *et al.*, 2023).

Tujuan dari program subsidi pupuk adalah untuk mendorong penerapan pupuk yang seimbang—baik organik maupun non-organik sesuai dengan pedoman penempatan dan kriteria teknis yang disarankan. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 menguraikan

persyaratan yang harus dipatuhi. untuk mematuhi hal ini. Penggunaan pupuk berdampak pada peningkatan hasil pertanian Indonesia. Zat kimia atau organik yang dikenal sebagai pupuk membantu tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung menyediakan unsur hara yang dibutuhkannya (Fadly *et al.*, 2015). Terjaminnya ketersediaan pupuk dari segi kuantitas, kualitas, dan biaya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait pupuk, seperti kurangnya pupuk bersubsidi. Persoalan struktur pasar yang cenderung oligopoli dan buruknya tata cara distribusi pupuk menjadi akar permasalahannya (Kautsar *et al.*, 2020).

Karena kekurangan pupuk, maka biayanya mahal dan petani sulit membelinya. Hal serupa juga terjadi di Distrik Tonjong; distribusi pupuk yang tidak tepat menyebabkan harga pupuk menjadi lebih tinggi dan menyulitkan petani untuk mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan. Pencapaian tujuan dan target yang telah ditentukan dalam organisasi, aktivitas, atau program apa pun sangat bergantung pada efektivitasnya. Jika tujuannya terpenuhi sesuai yang ditentukan, maka dianggap efektif (Setyawati, 2018). Oleh karena itu, efektivitas diukur dengan seberapa baik hasilnya selaras dengan tujuan yang telah ditentukan. Pemantauan program dapat digunakan untuk menilai apakah program Kartu Tani dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan indikator kemandirian program.

Petani biasanya membagi pupuk yang mereka gunakan menjadi dua kategori: bersubsidi dan non-subsidi. Pupuk yang disubsidi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani lokal disebut pupuk bersubsidi. Pupuk tidak bersubsidi yang dimaksud dengan pupuk yang diperoleh dan didistribusikan tanpa pengawasan pemerintah. Saat ini yang digunakan dalam pertanian adalah beberapa jenis pupuk bersubsidi, antara lain organik, NPK, urea, dan Poska. Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani, khususnya di Kabupaten Bojonegara, dan sebagian masyarakat di setiap daerah memiliki lahan pertanian, maka kebutuhan akan pupuk bersubsidi sangat tinggi. Efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi sangat penting untuk menjamin ketersediaan pupuk pada Harga Eceran Tinggi (HET) yang ditetapkan (Ramlayana *et al.*, 2020).

Penggunaan kartu kendali merupakan salah satu teknik untuk mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi. Tujuan dari kartu kendali pupuk adalah untuk: meminimalkan permasalahan yang ada karena alokasi pupuk saat ini tidak mencukupi karena terbatasnya rekomendasi; membuat petani merasa terlayani dengan baik; dan memperkuat hubungan positif antara kios resmi dan kelompok tani serta anggotanya. Transparansi kios dan Poktan serta anggotanya; pupuk dapat diterima petani sesuai peruntukannya; distribusi lebih terkendali bagi petani penerima (Gito, 2023).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2014 yang mengatur tentang kebutuhan, penyaluran, dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, petani yang mengolah lahan sampai dengan luas 2 (dua) hektar atau petani ikan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar. lahan seluas 1 (2) hektar berhak menerima pupuk bersubsidi. satu) hektar untuk setiap keluarga sepanjang musim tanam. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan saat ini tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pembelian pupuk bersubsidi dilakukan dan disalurkan kepada petani, pembudi daya ikan, dan/atau kelompok petani melalui distributor pada Jalur IV. Hasil penelitian (Deli Anwar, T. Makmur, 2018) Temuan analisa ini mengungkapkan sejumlah permasalahan mendasar yang menyebabkan pupuk diberikan kepada petani dengan biaya yang tidak tepat, jumlah yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat, kualitas yang tidak tepat, dan pengawasan yang tidak memadai. Permasalahan utama pada aspek pengumpulan data adalah penyusunan RDKK yang belum sah, penggunaan pupuk yang melebihi anjuran, dan data jumlah petani dan luas lahan yang tidak dapat diandalkan. Sedangkan hasil penelitian (Fadly *et al.*, 2015) menyatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dinilai efektif dengan menggunakan kartu petani.

Secara umum petani sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk, terutama terkait jenis pupuk yang tersedia, jumlah pupuk yang disalurkan, harga pupuk yang ditetapkan, dan waktu distribusi pupuk yang sering mengalami keterlambatan. Fenomena ini terpancang di Desa Jawik, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Karena banyaknya keluhan dari para petani selama bertahun-tahun, praktik distribusi pupuk bersubsidi ini beberapa kali dipertanyakan. Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu kendali juga merupakan salah satu alat evaluasi efektivitas subsidi pupuk, karena dalam praktiknya pemberian pupuk terkadang masih tertunda atau tidak sesuai dengan RDKK yang telah ditetapkan oleh asosiasi petani. Setiap kios harus membuat kartu kendali.

Karena masih terdapat beberapa toko yang menjual barang dengan harga di bawah harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, maka subsidi pupuk dengan harga eceran tertinggi masih menjadi permasalahan di bidang pelatihan terkait (Radar Bojonegoro, 2023). Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, terlihat adanya perbedaan, khususnya besaran pupuk bersubsidi yang tidak stabil dalam kategori efektif meskipun sudah ada kartu kontrol dan kartu tani.

Setelah melakukan observasi dan membandingkan data dengan penelitian sebelumnya, teridentifikasi adanya kesenjangan penelitian. Kesenjangan ini disebabkan meskipun sudah ada kartu kendali, namun teknik pendistribusian materi pelajaran yang dimaksud masih belum efektif. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar-benar tidak efektif atau masuk dalam kategori efektif. Selain itu, harga eceran yang dijual terkadang melebihi harga eceran maksimum yang ditetapkan pemerintah, dan pupuk yang didistribusikan sesuai dengan RDKK atau biasanya tidak terlihat di kartu kendali masing-masing petani. Hasil penelitian lanjut oleh (Setiawan Abdillah *et al.*, 2022). Aksesibilitas program melihat bahwa kebijakan program kartu tani Kabupaten Pakisjaya kurang memadai dan sulit diperoleh karena seringnya terjadi kesalahan pada mesin EDC untuk kegiatan penebusan pupuk bersubsidi, serta (Rahmawati, 2023) melakukan kajian dan menemukan bahwa kebutuhan petani dapat diatasi dengan penggunaan pupuk bersubsidi, dan distribusi pupuk dinilai efektif. Efisiensi kartu tani dalam memperoleh pupuk bersubsidi ditunjukkan dengan cepatnya pupuk sampai di daerah dan mudahnya membeli pupuk di kios pupuk. Oleh karena itu, kartu kendali yang dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan sebaiknya digunakan untuk pembelajaran. Ketika kartu kendali di kelompok tani masih ditemukan tidak berfungsi, maka distribusinya tidak jelas, artinya tujuan kartu tidak terlaksana dan pupuk yang disuplai tidak digunakan.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menggunakan angka-angka dalam menjelaskan permasalahan secara objektif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. diawali dengan pengumpulan data, penerjemahan data, dan merumuskan kesimpulan untuk menjawab hipotesis yang telah diidentifikasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Arikunto, 2018). Kuesioner digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Desain penelitian kuantitatif dengan teknik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, berkonsentrasi pada temuan dan kesimpulan, serta mendeskripsikan tindakan. Karena observasi menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, maka penelitian kuantitatif dilakukan. Studi ini akan memperjelas cara aspek-aspek yang berbeda berinteraksi satu sama lain (Sugiyono, 2019). Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner dan metode survei.

Distribusi pupuk yang disubsidi dan penggunaan kartu kendali menjadi faktor penelitiannya. Sekelompok petani membuat kartu kendali. Kartu ini berfungsi sebagai pengendali dan pedoman kuota pupuk petani. Pada kartu kendali terdapat catatan alokasi pupuk awal dari RDKK. Unsur-unsur yang menentukan cara pendistribusian dengan biaya lebih rendah antara lain tepat waktu, tepat kuantitas, tepat harga, tepat mutu, tepat lokasi, dan tepat jenis pupuk.

Peneliti menggunakan kuesioner, yaitu instrumen pengumpulan data dengan beberapa penjelasan berdasarkan survei terbuka, untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan berbicara dengan subjek penelitian dengan suara keras. Pengumpulan data langsung di lapangan dengan menggunakan persepsi yang tajam disebut observasi. Selain dokumentasi, mencari informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan faktor penelitian, antara lain buku, jurnal, komposisi, dan catatan tentang topik atau objek kajian. Strategi penelitian utama digunakan di Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo. Untuk memastikan populasi didasarkan pada kriteria tertentu dan jumlah yang dipilih peneliti, pendekatan kuota sampling digunakan dalam pemilihan responden (Kriyantono, 2012). Untuk penelitian ini dikumpulkan tiga puluh sampel dari kelompok tani Desa Jawik. Petani di Desa Jawik berjumlah 385 orang yang memenuhi syarat seperti memiliki kartu kendali untuk bergabung dalam kelompok tani.

Metode analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

2.1. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengolah informasi dan data yang diperoleh dari kuesioner. Data dan informasi akan langsung disajikan dalam bentuk tabel setelah diolah dan disortir sesuai dengan seberapa sebanding tanggapannya. Hasilnya kemudian ditampilkan berdasarkan jumlah peserta. Menurut (Nazir, 2017) Analisis deskriptif adalah metode untuk meneliti individu, kelompok tentang peristiwa, benda, situasi, dan mentalitas terkini. Sederhananya, analisis deskriptif memberikan informasi tentang data yang ada. Analisis ini mengkaji isu-isu sosial dan peraturan yang spesifik pada situasi tertentu. Analisis deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah distribusi pupuk di Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan kebijakan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan yang diterapkan saat ini dalam pembagian pupuk gratis. Dengan demikian, analisis deskriptif mengacu pada proses mencoba menggambarkan suatu situasi, atau topik dan sasaran kajian, dengan menggunakan fakta-fakta yang diketahui saat ini. Prosedur peneliti hanya dengan menulis ulang catatan lapangan atau menyalin hasil yang diambil selama wawancara. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mengetahui apakah Desa Jawik benar-benar telah menerapkan kartu kendali. Penjelasan tentang bagaimana kartu kendali digunakan dalam kelompok tani untuk menebus pupuk.

2.2. Analisis Persepsi Petani dengan Skala Likert

Berdasarkan definisi operasional peneliti, skala likert merupakan alat untuk mengukur pandangan, sikap, atau pendapat individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Skala Likert digunakan dalam memperkirakan jawaban survei yang diberikan kepada responden. Skala ini dimaksudkan untuk mengukur pola pikir, persepsi, dan kesimpulan seseorang. Faktor-faktor yang akan diestimasi diubah menjadi indikator variabel dengan menggunakan Skala Likert. Penanda-penanda ini kemudian digunakan sebagai langkah pertama dalam mengumpulkan instrumen, yang dapat berupa pertanyaan atau penjelasan (Sugiyono, 2019). Penjelasan dalam skala Likert ada dua jenis, yaitu definisi tentang apa yang dimaksud dengan mengukur perspektif positif atau negatif. Macam-macam bentuk survei pernyataan skala likert yang dikeluarkan kepada peserta adalah :

Sangat Setuju (Ss) Diberi Skor	= 5
Setuju (S) Diberi Skor	= 4
Kurang Setuju (Ks) Diberi Skor	= 3
Tidak Setuju (Ts) Diberi Skor	= 2
Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor	= 1

Strategi penelitian utama digunakan di Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo. Untuk memastikan populasi didasarkan pada kriteria tertentu dan kuantitas yang ditentukan oleh peneliti, pendekatan kuota sampling digunakan dalam pemilihan responden (Kriyantono, 2012). Untuk penelitian ini dikumpulkan dua puluh sampel dari masing-masing kelompok tani Desa Jawik. Sebanyak 385 petani di Desa Jawik memenuhi persyaratan, seperti memiliki kartu kendali, untuk bergabung dalam kelompok tani. Responden yang memiliki luas lahan pertanian padi tadah hujan yang sesuai dengan lahan yang tercantum pada data realokasi tahun 2023 wajib memenuhi tujuan studi tertentu.

2.3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Jawik merupakan sebuah wilayah di sisi barat Kabupaten Bojonegoro yang terletak di wilayah Tamakrejo wilayah Barat. Desa Jawik terletak di bagian Selatan Kecamatan Tamakrejo, berbatasan dengan Desa Sukorejo Selatan, Desa Gamongan sebelah Utara, Desa Bakalan sebelah Timur, dan Desa Tanjung sebelah Barat. Luas wilayah Desa Jawik kurang lebih 363,52 hektar, terdiri dari pulau non teknis dan tadah hujan 110,70 hektar, lahan kering 78,72 hektar, lahan hutan 2011 hektar, sawah tadah hujan 110,70 hektar, tanah kas desa 18.170 hektar, dan kuburan 1,2 Ha. (Profil Desa 2020). Penduduk di Desa Jawik berjumlah 2.046 jiwa, termasuk 633 KK. Petani di Desa Jawik yang terdaftar pada Badan Penyuluhan Pertanian berjumlah 548 orang. Para petani yang tergabung dalam RDKK ini dipecah menjadi 4 Kelompok Tani, yakni Sido Dadi Mulyo yang berjumlah 66 petani, Sedyo Makmur yang berjumlah 66 petani, Sedyo Mulyo yang berjumlah 171 petani, dan Sedyo Utomo yang berjumlah 82 petani. total. Dengan total luas lahan 833,85 hektar, Desa Jawik dihuni oleh 385 petani dari berbagai organisasi petani.S

Petani yang sebelumnya telah terdaftar sebagai data RDKK dan tergabung dalam kelompok tani adalah mereka yang memiliki kartu kendali. Mereka biasa mendaftar dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan bukti SPPT tahunan tahun sebelumnya, yakni tahun 2022. BPP kecamatan kemudian memverifikasi informasi petani di aplikasi tersebut. SIMLUHTAN selain menyampaikan informasi peruntukan pupuk petani dan RDKK pada Realokasi Tahun 2023.

2.4. Analisis Persepsi Petani Terhadap Program Distribusi Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Kendali

Tabel 1. Persepsi Petani Terhadap Dampak Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Jenis dampak	
		Kemudahan Memperoleh Pupuk Bersubsidi	Kemudahan Transaksi
1	Sangat tidak Setuju	1	0
2	Tidak setuju	3	4
3	Kurang Setuju	8	9
4	Setuju	12	10
5	Sangat setuju	6	7
Jumlah		30	30

Sumber : Analisis Data Primer 2023

Berdasarkan hasil Tabel 1, penggunaan kartu kendali akan mempermudah penerimaan pupuk bersubsidi di Desa Jawik, dengan 12 responden menyatakan setuju dan 6 responden menyatakan sangat setuju. Selain itu, dengan menggunakan Kartu Kendali, transaksi yang dilakukan petani menjadi lebih mudah. Tujuh petani menyatakan sangat setuju, dan sebelas petani menyatakan setuju.

Tabel 2. Persepsi Petani Terhadap Ketepatan Harga Pada Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak Setuju	0	0
2	Tidak setuju	7	23,40
3	Kurang Setuju	8	26,70
4	Setuju	15	43,40
5	Sangat setuju	5	16,70
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis Data Primer 2023

Berdasarkan hasil Tabel 2, 5 responden menyatakan sangat setuju dan 15 responden menyatakan setuju, dengan alasan keyakinan mereka bahwa harga yang mereka bayarkan sesuai dengan HET yang berlaku dan berkontribusi dalam menurunkan biaya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pupuk mereka. Delapan responden menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa harga yang ditawarkan sebagian besar tidak berubah dibandingkan periode sebelum program Kartu Kendali. Sementara 0 responden merasa tidak masuk akal karena mereka belum menerima pembayaran sesuai dengan HET yang berlaku dan jumlah yang mereka terima masih terlalu tinggi untuk usaha pertanian mereka, namun 7 responden tidak setuju.

Tabel 3. Persepsi Petani Terhadap Ketepatan Jumlah Pada Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Pernyataan		
		Jatah Pupuk RDKK	Kebutuhan Pupuk terpenuhi	Jumlah Pupuk Meningkatkan Produksi
1	Sangat tidak Setuju	1	2	8
2	Tidak setuju	20	15	17
3	Kurang Setuju	6	9	4
4	Setuju	3	4	1
5	Sangat setuju	0	0	0
Jumlah		30	30	30

Sumber : Analisis Data primer 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan tanggapan responden, hanya satu orang yang menyatakan bahwa pupuk Petah tidak mengikuti RDKK, sedangkan dua puluh orang menyatakan mengikuti RDKK. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk petah yang diperoleh masyarakat survei tidak sesuai dengan RDKK yang diminta. Makanan mereka tidak menyediakan nutrisi yang mereka butuhkan. Jumlah pupuk yang diberikan pemerintah masih kurang dari jumlah subsidi yang dibutuhkan petani untuk RDKK. Meskipun data tip tidak sepenuhnya sempurna, lebih dari separuh responden menunjukkan sedikit rasa kecewa dan mengatakan bahwa tip tersebut masih dianggap sangat bermanfaat jika dibandingkan dengan tidak menerima data tip secara rutin. Namun, sekitar lima belas responden menyatakan puas dengan jatah pupuk yang diberikan berdasarkan RDKK. Kebutuhan hidup mereka tercukupi bahkan produktivitasnya meningkat berkat kuota pupuk yang telah dipanen. Lima belas jawaban tidak setuju dengan pernyataan bahwa kebutuhan pupuk telah terpenuhi, dan dua jawaban sangat tidak setuju. Hal ini terjadi karena kebutuhan pupuk bersubsidi sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di sawah. Sembilan responden tidak setuju dengan pernyataan ini, menyatakan bahwa pupuk yang diterima cukup untuk tanah mereka pada beberapa musim tanam namun tidak memadai pada musim tanam lainnya. Meskipun demikian, empat responden menyatakan bahwa kebutuhan mereka akan pupuk telah terpenuhi, hal ini menunjukkan bahwa mereka berpikir

Delapan orang sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa semakin banyak pupuk maka akan meningkatkan produksi, dari total 17 responden yang menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk bersubsidi oleh responden masih belum mencukupi untuk meningkatkan produksi usahatani, yakni jumlah pupuk yang diterima tidak mencukupi untuk meningkatkan produktivitas. Hanya satu responden dari seluruh responden yang memberikan jawaban ya, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap subsidi pupuk dapat meningkatkan hasil pertanian.

Tabel 4. Persepsi Petani Terhadap Ketepatan Jenis Pada Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak Setuju	1	3,4
2	Tidak setuju	4	13,3
3	Kurang Setuju	2	6,6
4	Setuju	14	46,7
5	Sangat setuju	8	23,4
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis data primer 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa mengenai keakuratan jenis pupuk bersubsidi pada kartu kendali, 14 responden setuju, dan 8 responden sangat setuju. Di Desa Jawik, sebagian besar petani mendapatkan

kebutuhan pupuk dengan mengikuti pedoman pemerintah. Hanya 4 responden yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ketepatan jenis pupuk bersubsidi yang tercantum pada kartu kendali. Pupuk yang kini disubsidi adalah PHONSKA dan UREA.

Tabel 5. Persepsi Petani Terhadap Ketepatan Mutu Pada Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak Setuju	0	0
2	Tidak setuju	2	6,6
3	Kurang Setuju	4	13,4
4	Setuju	11	37
5	Sangat setuju	13	43,4
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis Data Primer 2023

Tabel 5 menunjukkan bahwa 11 responden setuju dan 13 responden sangat setuju terhadap kualitas pemberian pupuk bersubsidi melalui penggunaan Kartu Kendali. Dalam tanggapan mereka, empat responden lainnya menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan penilaian program terhadap keunggulan program tersebut.

Tabel 6. Persepsi Petani Terhadap Ketepatan Waktu Pada Kartu Kendali

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak Setuju	3	10
2	Tidak setuju	9	30
3	Kurang Setuju	11	37
4	Setuju	5	17
5	Sangat setuju	2	6
Jumlah		30	100

Sumber : Analisis Data Primer 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, dan 9 responden menyatakan tidak setuju dengan penyaluran pupuk bersubsidi cepat melalui Kartu Kendali. Beberapa petani tidak sependapat dengan pendapat tersebut dan menyatakan bahwa biasanya terjadi kekurangan stok pada tahap pemupukan, yang biasanya terjadi sebelum penanaman. Lima tanggapan dan dua responden sangat setuju bahwa pupuk bersubsidi Kartu Kendali ini disampaikan sesuai jadwal. Hanya 11% peserta yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ketepatan waktu Kartu Kendali. Dengan kata lain, meskipun mereka kadang-kadang mendapatkan pupuk bersubsidi ketika mereka membutuhkannya, namun kadang-kadang ada kekurangan pupuk bersubsidi ketika mereka menginginkannya.

3. KESIMPULAN

Kartu Kendal berhasil dan layak digunakan mulai dari tahap produksi kartu hingga transaksi kartu kendal, menurut data yang menunjukkan bagaimana persepsi hewan peliharaan selama pelatihan anjing subsisten di Desa Jawik. fase; Namun demikian, belum banyak petani yang menyelesaikan proses menentukan berapa banyak lokasi pupuk yang akan dimasukkan ke dalam kartu Kendal mereka. Pandangan petani mengenai alokasi pupuk bersubsidi melalui Kendal yang didiferensiasi. Sebagian besar petani sepakat bahwa menerima pupuk bersubsidi dan menjalankan usaha itu sederhana; namun demikian, jika menyangkut biaya pupuk, beberapa orang tetap percaya bahwa biayanya mahal, sementara yang lain percaya bahwa mereka menerima tawaran yang bagus.

Para petani dilaporkan masih menerima pupuk dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan mereka. Petani mempunyai keyakinan bahwa pupuk yang mereka peroleh dapat memenuhi kebutuhan mereka dan memiliki kualitas yang memadai. Pemupukan juga tidak boleh dilakukan secara salah. Secara transparan, kelompok tani masih belum bisa mengakses tata cara penyaluran pupuk bersubsidi karena jumlah di kartu kendali tidak sesuai dengan yang seharusnya di RDKK. pemberian pupuk dengan harga lebih murah dengan menggunakan kartu kendali

4. SARAN

Penyaluran pupuk bersubsidi sangat membantu dalam produktivitas usahatani, Kemudahan dalam mendapatkan jumlah dan ketepatan waktu sesuai masa tanam sangat menjadi harapan bagi petani dalam proses pertanian sehingga ekonomi pertanian dapat meningkat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budiaji, W. (2013). Jumlah respon skala likert dan skala pengukurannya. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, 2(127-133).
- Kholis, I. dan Khasan S. (2020). Evaluasi efektivitas petani padi dengan program subsidi pupuk. *Analisis Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9(2) 503-515.
- Ramlayana, Isa A. dan Sudarmi. Efisiensi Penyaluran Pupuk Subsidi Kepada Petani Padi Di Kecamatan Bontocani Desa Langi Kabupaten Bone. *Jurnal Unismuh* 1(3), 949-962.
- Nugroho, A. D., Abi P. S., Erlinda A., Yahya S. dan Julia I. C. (2018). Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 2(1) 70-82.
- Kautsar, M. R., Sofyan, & Makmur, T. (2020). Kajian dampak kelangkaan dan kekurangan padi (*Oryza sativa*) di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar terhadap produktivitas padi. *Jurnal Ilmu Mahasiswa Pertanian*, 5(1), :97-107.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Prinsip-prinsip pemasaran* (Vol. 1, Issue 2). Jilid.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurjaya, N., Sunarsi, D., Effendy, A. A., Teriyan, A., & Gunartin, G. (2021). Pengaruh Etos Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kota Bogor. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 4(2), :172. <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v4i2.9086>
- Rachman. (2016). Analisis Efektifitas Distribusi Pupuk di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. *Urnal Ekonomi Dan Pertanian*, 8 (10), :41-62.
- Moko, K. W., Suwanto & Utami B. W. 2017. Variasi Pandangan Petani Terhadap Program Kartu Tani Kabupaten Sragen di Kecamatan Kalijambe. *Journal of Sustainable Agriculture* Vol. 32 No.1: 9-13.
- Nazir M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat
- Deo J, (2020). Evaluasi terhadap program pupuk bersubsidi berbasis kartu tani di kabupaten Karanganyar.
- Assauri, S. (2018). *Manajemen pemasaran: Dasar, konsep, dan strategi*.
- Ayu, I. G., & Lies, A. (2016). Upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi : tinjauan terhadap aspek teknis, manajemen dan regulasi. 3(1), :4-32.
- Azhari, W. N. (2018). ASPEK-ASPEK DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI (Kabupaten Gunungkidul). *Skripsi. Universitas Islam Indonesia*, 53(1), 1–8.
- Kios Resmi UD.TANEM, (2023) Alokasi pupuk Bersubsidi Desa Jawik Tahun 2023. Pupukbersubsidi.pertanian.go.id